

ABSTRAK

Skripsi ini membahas Perusahaan Tambang Freeport dalam kerjasamanya dengan Pemerintah Indonesia pada era Pemerintahan Jokowi dengan tujuan mengetahui bagaimana dan mengapa Presiden Jokowi memperpanjang kerjasama dengan Freeport, serta menggambarkan situasi yang kompleks jika kerjasama ini dilanjutkan maupun tidak dilanjutkan. Melalui pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif. Hal yang menjadi topik utama dalam penelitian ini adalah mengapa Presiden Jokowi mengubah kebijakan kerjasama dari kontrak karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Peranan Presiden Jokowi dalam mengambil kebijakan pengajuan ijin perpanjangan kerjasama Freeport dalam bentuk izin usaha pertambangan khusus (IUPK), hal ini ditandai dengan kerjasama Freeport dengan Pemerintah Indonesia yang akan berakhir pada tahun 2021.

Kata kunci: Kerjasama Freeport dengan Indonesia, Freeport, Perpanjangan Kerjasama Freeport

ABSTRACT

This thesis discusses the Freeport Mine Company in the issues of cooperation with the Government of Indonesia in the era of Jokowi President with the aim of knowing how and why President Jokowi extends the cooperation with Freeport, and describes the complex situation if the cooperation is continued or not continued. Through qualitative approach with descriptive character. The main topic in this research is why President Jokowi changed the cooperation policy from the contract of work to a Special Mining Business License. The role of President Jokowi in taking the policy to apply for a permit to extend Freeport's cooperation in the form of a special mining business License, this is marked by the Freeport cooperation with the Government of Indonesia which will end in 2021.

Keywords: Freeport cooperation with Indonesia, Freeport, Freeport cooperation extends

